

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 83 TAHUN 2024**  
**TENTANG BADAN GIZI NASIONAL : STUDI KASUS**  
**PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI SEKOLAH**  
**MENENGAH ATAS NEGERI 1 AMUNTAI**

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
pada jurusan Administrasi Publik



Oleh:

**AHMAD HAFIZ FAKHRIN**

NPM : 2022170

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**

**2026**

## TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : AHMAD HAFIZ FAKHRIN

NPM : 2022170

Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : **“ IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 83  
TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL :  
STUDI KASUS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS  
(MBG) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
AMUNTAI”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

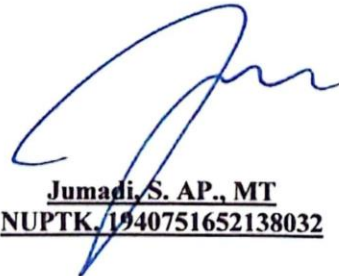
Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



**Anna Marvati, S.Sos., M.AP.**  
**NUPTK. 3055772673230273**



**Jumadi, S. AP., MT**  
**NUPTK. 1940751652138032**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik




**Ahmad Balhaqi, S.Sos, M.A**  
**NIK. 19921104 2015091 021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional: Studi Kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai”**. Penyusunan proposal ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik (STIA) Amuntai.

Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penyajian maupun isi. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya proposal ini tidak terlepas dari peran serta, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif serta menjadi tambahan wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan dan bagi pengembangan penelitian di masa mendatang.

Amuntai, 15 Februari 2026

Ahmad Hafiz Fakhrin

## DAFTAR ISI

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| COVER .....                         | i   |
| KATA PENGANTAR.....                 | ii  |
| DAFTAR ISI .....                    | iii |
| DAFTAR TABEL.....                   | v   |
| DAFTAR GAMBAR .....                 | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....             | 1   |
| A. Latar belakang .....             | 1   |
| B. Fokus penelitian .....           | 5   |
| C. Rumusan Masalah.....             | 6   |
| D. Tujuan Penelitian .....          | 6   |
| E. Manfaat Penelitian .....         | 6   |
| BAB II LANDASAN TEORI.....          | 8   |
| A. Hasil Penelitian Terdahulu ..... | 8   |
| B. Tinjauan Teoritis.....           | 10  |
| C. Kerangka Pemikiran.....          | 17  |
| BAB III METODE PENELITIAN.....      | 20  |
| A. Lokasi Penelitian.....           | 20  |
| B. Pendekatan Penelitian .....      | 20  |

|                      |                                     |    |
|----------------------|-------------------------------------|----|
| C.                   | Tipe Penelitian .....               | 20 |
| D.                   | Data dan Sumber Data .....          | 21 |
| E.                   | Desain Operasional Penelitian ..... | 23 |
| F.                   | Teknik Pengumpulan Data .....       | 24 |
| G.                   | Teknik Analisa Data.....            | 25 |
| H.                   | Uji Kredibilitas Data .....         | 27 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... |                                     | 29 |

**DAFTAR TABEL**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Informan wawancara.....            | 22 |
| Tabel 2. 2 Desain Operasional Penelitian..... | 23 |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... | 19 |
|-------------------------------------|----|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia adalah tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat. Gizi yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, tetapi juga terhadap perkembangan kognitif, daya tahan tubuh, serta kemampuan belajar individu. Dalam konteks pendidikan, status gizi peserta didik memiliki keterkaitan yang erat dengan konsentrasi, daya serap materi, dan capaian akademik. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang memadai bagi anak usia sekolah menjadi salah satu investasi strategis dalam pembangunan jangka panjang.

Namun demikian, permasalahan gizi di Indonesia masih menjadi tantangan yang kompleks. Berbagai laporan menunjukkan masih adanya kasus kekurangan gizi, anemia pada remaja, serta pola konsumsi makanan yang kurang seimbang. Faktor ekonomi, kurangnya literasi gizi, serta keterbatasan akses terhadap makanan bergizi menjadi penyebab utama kondisi tersebut. Permasalahan ini tentu memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan dari pemerintah agar dapat ditangani secara sistematis dan menyeluruh.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola kebijakan gizi nasional, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional. Peraturan Presiden ini menjadi dasar hukum pembentukan lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan program-program pemenuhan gizi di tingkat nasional maupun daerah. Kehadiran Badan Gizi Nasional diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai program yang sebelumnya tersebar di beberapa instansi, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Salah satu program prioritas yang lahir dari kebijakan tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Program ini dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada siswa sebagai upaya meningkatkan asupan nutrisi harian mereka. Selain bertujuan memperbaiki status gizi, program ini juga memiliki dimensi sosial, yaitu membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya program MBG, diharapkan tidak ada lagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akibat kurangnya asupan makanan yang layak dan bergizi.

Implementasi kebijakan publik pada tingkat satuan pendidikan tentu memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dan pihak sekolah. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan Program MBG. Sebagai sekolah dengan jumlah peserta didik yang cukup besar dan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, pelaksanaan program ini menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal.

Dalam praktiknya, implementasi Program MBG tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti mekanisme distribusi makanan, pengawasan kualitas dan standar gizi, kesiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi. Selain itu, aspek partisipasi siswa dan penerimaan masyarakat terhadap program juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berjalan di lapangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan program secara optimal. Secara normatif, program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik serta mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Namun, dalam praktiknya di tingkat satuan

pendidikan, khususnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai, terdapat sejumlah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasinya.

Berdasarkan observasi awal di lapangan serta informasi yang berkembang di media sosial, pelaksanaan program ini masih menimbulkan berbagai tanggapan dan perhatian terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan sekolah, sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program masih memerlukan perhatian lebih agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal:

1. Adanya keberadaan warung dan koperasi sekolah yang menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman menjadi alternatif bagi siswa dalam memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Kondisi ini menyebabkan sebagian siswa lebih memilih membeli makanan sendiri dibandingkan mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).. Selain itu, keterbatasan porsi serta variasi makanan dan minuman yang disediakan dalam program, meskipun tidak terdapat larangan bagi siswa untuk membeli makanan tambahan di luar program tersebut, turut memengaruhi pilihan siswa dalam memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. (Sumber: Observasi Penulis)
2. Keterbatasan sarana pendukung dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah menyebabkan kegiatan makan dilakukan di dalam ruang kelas. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan terganggunya suasana belajar, sehingga menunjukkan bahwa kesiapan

sarana prasarana dalam implementasi program belum sepenuhnya optimal.

(Instagram: <https://www.instagram.com/reels/DSb8do5FWVv/>)

3. Distribusi dan waktu pembagian makanan yang kurang efektif, karena sering kali berbenturan dengan jam pelajaran dan mengganggu konsentrasi belajar siswa. Proses pembagian yang memerlukan waktu cukup lama menyebabkan aktivitas belajar mengajar terhenti sementara, serta mengganggu konsentrasi siswa dalam mengikuti pelajaran. (Sumber: Observasi Penulis)

Mengingat pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi dan kualitas kesehatan peserta didik, maka pelaksanaan program ini perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi harian siswa, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional: Studi Kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai.”

## **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian perlu dinyatakan secara eksplisit guna memberikan batasan yang jelas agar penelitian lebih terarah serta memudahkan peneliti dalam melakukan proses observasi dan pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980) sebagaimana dikutip dalam buku Analisis Kebijakan Publik oleh Subarsono (2020:90–92), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Menurut George C. Edwards III (1980) (Subarsono, 2020:90-92), ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

### **C. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan lebih mengarah pada permasalahan maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai sebagai pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai

## **E. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, terutama dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan satuan pendidikan.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pihak sekolah maupun instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam implementasi program di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai agar tujuan peningkatan status gizi dan kesehatan peserta didik dapat tercapai secara optimal.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi tambahan berupa informasi, data, dan dokumentasi ilmiah mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan studi lanjutan yang berkaitan dengan kebijakan pemenuhan gizi, implementasi kebijakan publik, dan pendidikan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yasir Mu'afi (2025) berjudul “Analisis Sentimen Mengenai Kebijakan Makan Bergizi Gratis Menggunakan Metode Support Vector Machine” membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data mining. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai respons publik terhadap kebijakan MBG, baik yang bersifat positif, negatif, maupun netral. Untuk mengetahui kecenderungan sentimen masyarakat, peneliti menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) dengan pembobotan TF-IDF. Data diperoleh dari komentar Instagram pada tahun 2024 dan 2025 yang membahas kebijakan tersebut. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu preprocessing data (cleaning, case folding, tokenizing, stopword removal, dan stemming), pembobotan kata, serta klasifikasi menggunakan SVM dengan dua jenis kernel, yaitu linear dan polynomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa terbaik diperoleh pada dataset tahun 2025 dengan rata-rata akurasi sebesar 78%, sedangkan dataset gabungan memperoleh akurasi 76%, dan dataset tahun 2024 memperoleh akurasi 70%.

Selain itu, kernel polynomial menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan kernel linear, dan pembagian data latih dan uji dengan rasio 80:20 menghasilkan performa yang lebih optimal dibandingkan rasio 70:30. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode SVM cukup efektif dalam menganalisis sentimen kebijakan publik, serta menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan MBG bersifat beragam dan dinamis.

2. Syamsul Bahri ZR (2025) skripsi judul “Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar’iyyah)” dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana implementasi program MBG di Kabupaten Pinrang serta meninjau kebijakan tersebut dari perspektif Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program MBG di Kabupaten Pinrang berjalan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pada tahap pelaksanaan, sekolah-sekolah menunjukkan kesiapan yang baik dan mendapat dukungan dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta orang tua siswa. Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, penelitian ini juga

menemukan bahwa keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dari aspek regulasi, program MBG didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Pangan dan Undang-Undang tentang Kesehatan, serta kebijakan presiden melalui Badan Gizi Nasional. Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, program ini dinilai sebagai bentuk kemaslahatan umum (masalah 'ammah) karena bertujuan menjaga kesehatan generasi muda, mengurangi angka stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga dinilai sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga akal (hifz al-'aql).

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Konsep Implementasi**

Secara umum, implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah suatu kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak akan memberikan dampak yang diharapkan.

Menurut George C. Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama,

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan sasaran program. Sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dan informasi. Disposisi berhubungan dengan komitmen dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi menyangkut mekanisme koordinasi, prosedur, dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Teori-teori tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada pelaksanaan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diwujudkan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai.

## 2. Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Menurut Thomas R. Dye (1972), kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan hasil pilihan yang memiliki konsekuensi terhadap masyarakat.

Sementara itu, menurut Anderson (1979), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menangani suatu masalah. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berbentuk keputusan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan nyata dalam penyelesaian masalah.).

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan.

Sebagian besar para ahli memberi kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi warga kehidupan warganya.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (Subarsono, 2013:3) berpendapat bahwa “kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai- nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat”.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono, 2013:2) adalah “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public to do or not do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah, disamping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik”. Definisi kebijakan publik menurut Thomas Dye mengandung makna bahwa :

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung

dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson (Sahya Anggara,2016:507) yaitu:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang tertentu yang bersifat memaksa.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan publik tersebut biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

b. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bagian terpenting dari kajian ilmu administrasi publik dewasa ini, kajian-kajian kebijakan publik terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan pentingnya kebijakan publik yang baik. Tiga pilar utama dalam kebijakan publik yang menghiasi perkembangan ilmu administrasi publik, yaitu *policy formulation, policy implementation, and policy evaluation*. (Hayat, 2018:24).

Persoalan kebijakan publik seringkali mengabaikan prinsip-prinsip karakteristik yang melekat dimasing-masing negara. Setiap negara mempunyai karakter yang berbeda satu sama lainnya. Negara-negara berkembang tentunya mempunyai karakter yang berbeda dengan negara-negara maju dalam segala aspeknya. Namun demikian, di negara-negara berkembang, kebijakan publik dikembangkan seperti di negara-negara maju (Nugroho, 2015), dikutip dari Hayat (2018:25).

c. Bentuk Kebijakan Publik

Riant Nugroho dikutip dari Hayat (2018:77-82) membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, peternalistik (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin, Bentuk pertama adalah undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai pedoman dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai

bentuk kebijakan publik, undang-undang, harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembuatan undang-undang melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan untuk dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bentuk kedua adalah paternalistik yakni berperilaku seperti ayah yang berkaitan dengan sikap pemimpin kepada pegawainya. Pemimpin berperilaku seperti seperti bapak dan pegawai berperilaku seperti anak. Yang demikian itu adalah bentuk kebijakan yang melekat dan terjadi di semua level kebijakan. Nugroho membagi paternalistik menjadi dua bagian, yaitu paternalistik konvensional dan paternalistik rasional. Paternalistik konvensional menjadikan pemimpin sebagai raja. Tidak hanya menjadi kewajiban bagi para bawahan untuk wajib dan tunduk pada titah pemimpin, tetapi itu sudah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat.

Ketiga adalah perilaku pemimpin. Perilaku atau sikap pemimpin menjadi kebijakan publik. Dalam ranah yang agak vulgar pun hal itu dapat terjadi, bahwa kebijakan publik adalah sikap dari pemimpin itu sendiri. Korupsi menjadi salah satu contoh yang masih marak terjadi dalam kaidah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemimpin mengantarkannya pada kasus korupsi.

### 3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

#### a. Pengertian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di bidang pemenuhan gizi yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara cuma-cuma kepada peserta didik di satuan pendidikan.

Secara konseptual, program pemberian makanan di sekolah (school feeding program) merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak usia sekolah melalui penyediaan asupan makanan yang memenuhi standar kebutuhan gizi harian. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

#### b. Tujuan dan Manfaat Program MBG

##### 1) Tujuan:

- a) Program MBG bertujuan untuk memastikan peserta didik memperoleh asupan makanan yang mengandung unsur gizi seimbang, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pemenuhan gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah berbagai permasalahan kesehatan seperti anemia dan kekurangan energi kronis.

- b) Asupan gizi yang baik memiliki korelasi positif dengan fungsi kognitif, daya konsentrasi, serta kemampuan berpikir siswa. Program MBG bertujuan untuk menciptakan kondisi fisik dan mental yang mendukung proses pembelajaran di kelas. Siswa yang tidak mengalami rasa lapar atau kekurangan energi cenderung lebih fokus, aktif, dan mampu menyerap materi pelajaran dengan lebih baik; dan/atau
  - c) Mengurangi kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi keluarga. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi di rumah. Oleh karena itu, melalui program ini pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh peserta didik, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh kesempatan yang setara dalam mendapatkan asupan makanan yang layak dan sehat;
- 2) Manfaat:
- a) Ketersediaan makanan bergizi di sekolah dapat menjadi faktor pendukung meningkatnya motivasi siswa untuk hadir secara rutin. Program ini membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah dan peduli terhadap kebutuhan dasar siswa;
  - b) Siswa yang memperoleh asupan gizi yang cukup cenderung memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik

serta daya pikir yang lebih optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, berdiskusi, maupun menyelesaikan tugas-tugas akademik.

- c) Program MBG tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga berperan dalam membentuk kebiasaan makan sehat serta meningkatkan literasi gizi bagi siswa. Melalui program ini, sekolah dapat menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya pola konsumsi makanan yang seimbang.

#### 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Negara

- a. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional bertujuan untuk menganalisis dasar konseptual, yuridis, dan administratif dari pembentukan lembaga tersebut dalam perspektif teori kebijakan publik, teori kelembagaan, dan teori tata kelola pemerintahan.

Peraturan Presiden ini secara resmi membentuk Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional

Dalam pasal 1 pembentukan Badan Gizi Negara ini menunjukkan dasar legal pembentukan lembaga negara. Dalam perspektif Teori Kelembagaan (Scott, 2014), pembentukan melalui regulasi formal merupakan bentuk legitimasi regulatif

(regulative pillar). Artinya, Badan Gizi Nasional memperoleh kekuatan hukum dan otoritas langsung dari Presiden.

Dalam pasal 2 Tugas Badan Gizi Negara ini memperlihatkan bahwa negara secara eksplisit mengambil tanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat. Dalam perspektif Welfare State (Friedmann, 1960), negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial.

Dalam Pasal 3 diatur fungsi Badan Gizi Nasional, antara lain:

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis,
- Pelaksanaan kebijakan,
- Koordinasi dan sinkronisasi,
- Pemantauan dan evaluasi,
- Pelaporan dan administrasi

### **C. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang bertujuan untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di satuan pendidikan, termasuk di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai.

Secara konseptual, kebijakan publik tidak hanya berhenti pada

tahap perumusan, tetapi harus diimplementasikan secara efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam konteks ini, implementasi menjadi tahapan krusial karena keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu:

1. Komunikasi (Communication)

Kejelasan informasi kebijakan, penyampaian tujuan program, serta konsistensi instruksi kepada pelaksana dan sasaran program. Dalam konteks MBG, komunikasi mencakup sosialisasi tujuan program kepada sekolah, guru, siswa, dan orang tua.

2. Sumber Daya (Resources)

Ketersediaan anggaran, tenaga pelaksana, sarana dan prasarana, serta kualitas makanan yang disediakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal.

3. Disposisi (Disposition)

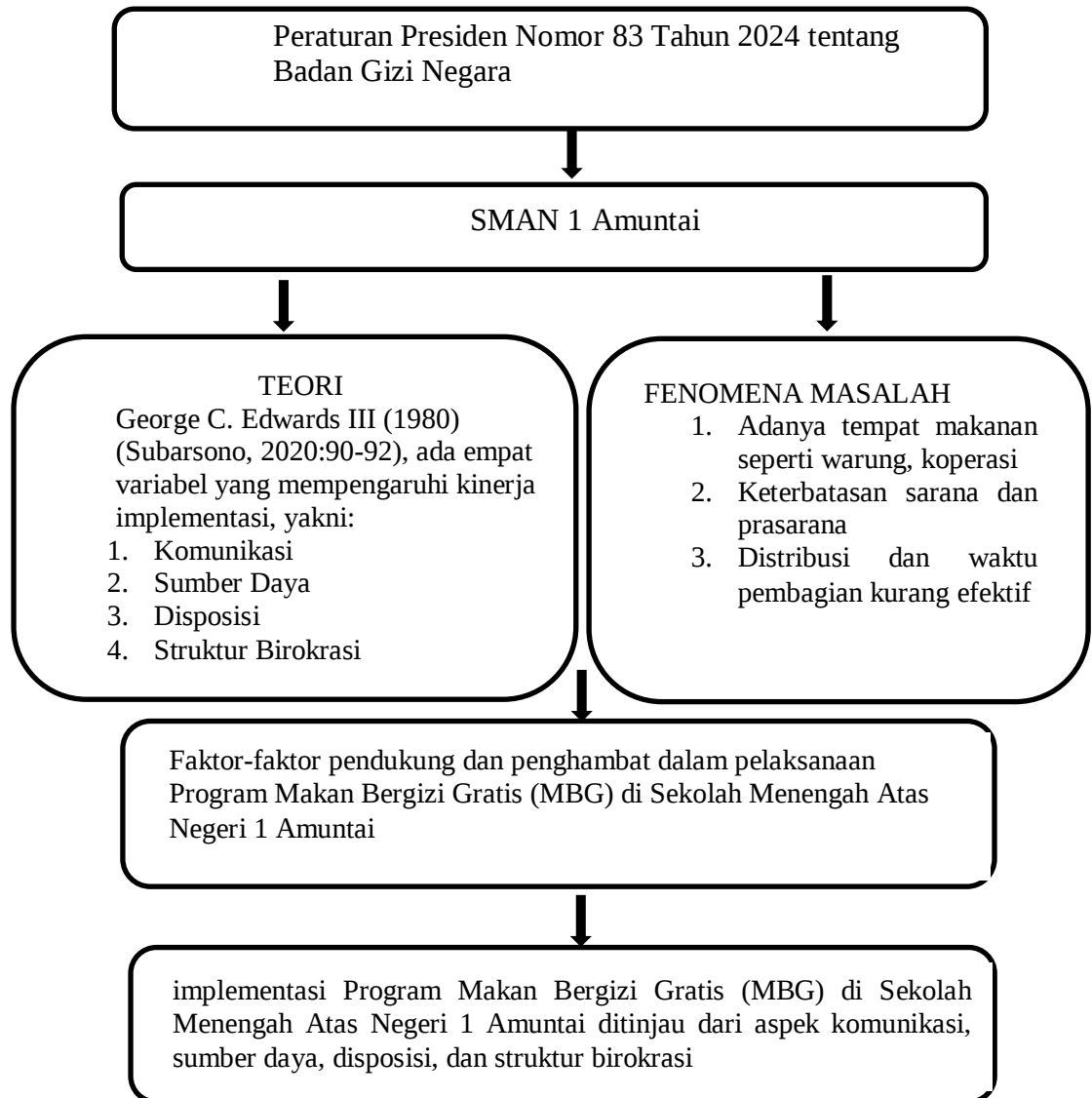
Sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hal ini mencakup dukungan pihak sekolah dan pihak terkait dalam melaksanakan Program MBG.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Kejelasan pembagian tugas, prosedur operasional, serta

mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program. maka penulis membuat kerangka pemikiran yang tercantum dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah SMA Negeri 1 Amuntai JL. Sukma Raga, No. 325 RT. 6, Sungai Malang Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara, 71414, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71471.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu pendekatan untuk mengungkapkan hasil penelitian yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung, sehingga menghasilkan deskriptif dengan menggambarkan secara logis dan kritis terhadap keadaan penelitian sebenarnya.

##### **C. Tipe Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang menghasilkan data distiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pelaku yang di amati.

#### D. Data dan Sumber Data

1. Adapun data dalam penelitian terbagi menjadi dua yang meliputi meliputi:

- a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digali dari informan penelitian tentang **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional: Studi Kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Amuntai.**

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada. Data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian ini. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Untuk penelitian ini data sekundernya berupa buku, surat kabar yang terkait dengan **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional: Studi Kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Amuntai.**

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diiperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data nya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.

**Tabel 2.1**  
**Informan wawancara**

| <b>No</b> | <b>Jabatan</b>               | <b>Jumlah</b> |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 1.        | Kepala Sekolah               | 1 Orang       |
| 2.        | Wakil Kepala Sekolah         | 1 Orang       |
| 3.        | Penanggung jawab Program MBG | 1 Orang       |
| 4.        | Guru                         | 2 Orang       |
| 5.        | Siswa                        | 4 Orang       |
| Total     |                              | 9 Orang       |

### E. Desain Operasional Penelitian

Desain penelitian adalah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami setiap variabel penelitian sebelum dilakukan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengelola menganalisis dan menyajikan data secara sistematis. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini maka desain operasional penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Desain Operasional Penelitian**

| <b>Variabel</b>                                                                                                                                                          | <b>Sub Variabel</b>   | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPLEMENTASI<br>PERATURAN<br>PRESIDEN<br>NOMOR 83<br>TAHUN 2024<br>TENTANG<br>BADAN GIZI<br>NEGARA<br>menurut<br>George C<br>Edward III<br>(dalam<br>Subarsono.<br>2020) | 1. Komunikasi         | a. Kejelasan informasi program MBG<br>b. Sosialisasi kebijakan kepada sekolah<br>c. Konsisten intruksi dari pemerintah daerah<br>d. Pemahaman guru dan petugas terhadap program |
|                                                                                                                                                                          | 2. Sumber daya        | a. Ketersediaan anggaran program<br>b. Sarana dan prasarana distribusi makanan                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                          | 3. Disposisi          | a. Komitmen sekolah menjalankan program<br>b. Sikap guru terhadap program MBG<br>c. Respons siswa terhadap makanan                                                              |
|                                                                                                                                                                          | 4. Struktur Birokrasi | a. SOP pelaksanaan program<br>b. Mekanisme pengawasan program                                                                                                                   |

*Sumber : Diolah Peneliti, 2026*

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan masalah penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Menurut Sugiyono (2019), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan teknik lainnya karena dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses implementasi kebijakan/pelayanan di sekolah berlangsung, termasuk interaksi antara pelaksana kebijakan dengan pihak yang menerima layanan. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif pasif, dimana peneliti hadir di lokasi penelitian namun tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati.

### **2. Wawancara**

Menurut Moleong (2017), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan yang telah ditentukan melalui teknik purposive sampling, seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

### 3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Dokumen kebijakan atau peraturan yang berlaku
- b) Standar Operasional Prosedur (SOP)
- c) Arsip laporan kegiatan
- d) Foto kegiatan atau bukti pelaksanaan kebijakan.

### G. Teknik Analisa Data

Menurut Mudjiahardjo (2015:270) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Menurut Sugiyono (2013:245) analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan. Teknik analisis ini juga digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI**

## **NASIONAL: STUDI KASUS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1**

**AMUNTAL.** Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo.

### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif (deskriptif), tabel matriks berdasarkan indikator variabel, kutipan hasil wawancara dari informan, dan penyajian data disusun berdasarkan masing-masing indikator implementasi kebijakan di sekolah, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan antar kategori, serta menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat

memahami kondisi nyata di lapangan secara lebih komprehensif..

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh setelah peneliti memahami pola, hubungan, serta makna dari data yang telah disajikan.

Kesimpulan yang diambil bersifat sementara pada awalnya, namun akan semakin kuat setelah dilakukan proses verifikasi secara terus-menerus. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi, mencocokkan data lapangan dengan dokumen resmi sekolah, Melakukan triangulasi sumber dan teknik

Kesimpulan akhir akan menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan publik di sekolah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya..

## H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data adalah pengujian data untuk menilai kebenaran dan keabsahan peneliti dengan analisis kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian akan ditunjukkan jika partisipan menyatakan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dari dirinya sendiri.

Menurut Sugiyono (2022:185) uji kredibilitas data menunjukkan kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan, dengan adanya perpanjangan pengamatan,, peneliti dapat mengecek Kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Apabila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.
2. Meningkatkan ketekunan, Meingkatkan ketekunann berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, yaitu dengan cara terjun langsung mencari data kemasyarakat. Denagn cara tersebut maka kepastian data dan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
3. Triangulasi, triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakkukan penngumpulan data.
4. Analisis Kasus Negatif, analisis kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
5. Menggunakann Bahasa Referensi, maksudnya adalah dengan adanya pendukung untuk membuktikan bahwa data yang telah

ditemukan oleh penelliti seperti rekaman wawancara, data interaksi dengan informan, gambaran suatu keadaan perlu didukung dengan sebuah foto.

6. Mengadakan Member check, member check adalah suatu proses pengecekan data yang telah diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data, hal ini bertujuan unntuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai atau tidak dengan apa yang yang diberikan oleh pemberi data, jika sesuai maka data tersebut dapat dipercaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Pedoman program Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan*
- Dr. Drs. H. Yadiman, SH. MH (2025). Kajian Program MBG (Makan Bergizi Gratis).
- Bahri ZR, Syamsul. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah). Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. ❖
- Mu'afi, Ahmad Yasir. (2025). Analisis Sentimen Mengenai Kebijakan Makan Bergizi Gratis Menggunakan Metode Support Vector Machine. Skripsi. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 3. Bandung Alfabeta
- Badan Gizi Nasional. (2024). *Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Badan Gizi Nasional.
- Mu'afi, A. Y. (2025). *Analisis sentimen mengenai kebijakan makan bergizi gratis menggunakan metode support vector machine*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Marwiyah, Siti. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV Mitra Ilmu
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media
- Abdul Wahab, S. (2020). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.

Fiantika, Feny Rita, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.